

TRANSISI MENUJU DEMOKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Banyak pengamat luar, melihat masa reformasi di Indonesia sekarang ini sebagai suatu proses transisi menuju demokrasi. Beberapa petunjuk bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sedang dalam proses menuju demokrasi itu bisa dilihat dari adanya kebebasan berpendapat, yang mendapat pengakuan sepenuhnya. Salah satunya adalah kebebasan pers, yang bisa kita saksikan dengan munculnya banyak harian, tabloid, dan majalah baru, yang mengetengahkan macam-macam visi dan versi pemberitaan. Juga munculnya partai-partai politik, yang memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sesuai dengan apa yang dipikirkan, dan ingin diwujudkan dalam kenyataan. Belum lagi kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, yang bisa kita lihat dalam forum-forum kajian, yang sekarang dengan leluasa bisa membicarakan mengenai realitas politik Indonesia.

Transisi menuju demokrasi adalah proses, seperti demokrasi itu sendiri adalah proses demokratisasi. Dalam bahasa budaya, demokrasi itu bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja, sebagai proses demokratisasi. Karena itu, penting sekali memahami mengapa sebagai proses, demokrasi itu harus wujud dalam kehidupan sehari-hari, sebagai cara hidup (*way of life*).

Cara hidup seperti apakah yang dapat menandai tumbuhnya proses menuju demokrasi itu? Beberapa pengalaman negara-negara yang tingkat intensitas demokrasinya tinggi menunjukkan beberapa

hal prinsip-prinsip berikut yang wujud dalam kenyataan mereka dalam mewujudkan proses demokratisasi itu.

(1) *Prinsip kesadaran kemajemukan*. Dalam kenyataan masyarakat Indonesia, pluralisme adalah kenyataan. Tetapi kesadaran kemajemukan bukan hanya suatu kesadaran pasif tentang kenyataan masyarakat yang majemuk, lebih dari itu, harus merupakan suatu usaha aktif untuk menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan segi positif dari kemajemukan ini untuk memperkaya proses berbangsa. Artinya masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan sendirinya teguh memelihara dan melindungi ikatan-ikatan kemajemukan yang sudah tumbuh, dan mengembangkannya untuk suatu tujuan kebersamaan yang lebih tinggi. Prinsip ini dengan jelas mengemukakan bahwa suatu titik temu bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan bersama. Maka paham kemajemukan adalah salah satu pilar penting dari demokrasi.

(2) *Prinsip musyawarah*. Kata “musyawarah” dikenal dalam istilah perpolitikan kita, berasal dari bahasa Arab, yang artinya “saling memberi isyarat”. Dengan keinsyafan ini berarti bahwa ada kedewasaan dengan tulus menerima kemungkinan untuk berkompromi, bahkan kalah suara. Semangat yang mendasari keinsyafan ini menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadi “*partial functioning of ideals*” — pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Inilah bentuk kompromi atau *ishlāh* yang perlu dijunjung dalam suatu masyarakat yang sedang menuju ke demokrasi. Prinsip ini menuntut kedewasaan dalam mengemukakan pendapat, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Prinsip musyawarah ini juga menentang monolitisme dan absolutisme. Seorang pemimpin hanyalah “yang pertama di antara yang sama” (*the first among the equals, primus inter pares*).

(3) *Prinsip cara haruslah sejalan dengan tujuan*. Prinsip ini mengemukakan mengenai dasar bahwa suatu tujuan yang baik

haruslah diabsahkan dengan kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Filsuf Prancis Albert Camus mengatakan, “*Indeed the end justifies the means. But what justifies the end? The means!*”

Artinya, demokrasi akan hancur kalau ada pertentangan antara cara dan tujuan, seperti dalam istilah “tujuan yang menghalalkan cara”. Maka, penerapan prinsip ini memang menuntut suatu standar moral politik yang tinggi. Dengan kata lain, demokrasi tidak terbayang tanpa akhlak. Demokrasi juga memerlukan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, yang membebaskan seseorang atau kelompok dari kekhawatiran yang berlebihan, termasuk kecurigaan dan prasangka yang berlebihan terhadap orang atau kelompok yang lain.

(4) *Prinsip permufakatan yang jujur*. Ini adalah buah dari penerapan permusyawaratan yang jujur dan sehat. Dengan begitu prinsip ini sebenarnya menolak jenis-jenis permufakatan yang dicapai melalui perekrayaan, manipulasi atau taktik-taktik yang sesungguhnya merupakan hasil dari sebuah konspirasi. Jenis permufakatan ini jelas-jelas bukan hanya curang, cacat dan sakit, bahkan mengkhianati nilai dan semangat demokrasi itu sendiri, yang menuntut ketulusan dalam proses sosial, di mana perlu pembebasan diri dari *vested interest* (egoisme) yang sempit.

(5) *Prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi dan perencanaan sosial-budaya*. Prinsip ini sangat penting untuk mendukung terealisasinya kehidupan demokrasi. Ada indikasi langsung antara kemakmuran dan kehidupan demokratis. Karena itu penting sekali suatu perencanaan pemenuhan kehidupan ekonomi rakyat, dan pemenuhan hak-hak sosial-politik yang *check-list*-nya adalah nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

(6) *Prinsip kebebasan nurani (freedom of conscience)*. Ini adalah prinsip dasar dalam politik, yang merupakan nilai-nilai asasi dalam demokrasi. Prinsip ini meneguhkan egalitarianisme, dan tingkah laku penuh percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain. Dengan demikian prinsip ini meneguhkan pandangan mengenai

manusia yang positif dan optimis, yang akan mendorong kerjasama antarwarga masyarakat, dan saling mempercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, yang merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Maka atas dasar kebebasan nurani ini pula, pada dasarnya demokrasi menolak suatu masyarakat yang terkotak-kotak, yang saling mencurigai satu sama lain. Demokrasi tak akan tumbuh dalam suatu masyarakat yang terpecah-pecah.

(7) *Prinsip perlunya pendidikan demokrasi.* Ini adalah hal yang sangat mendasar, apalagi kenyataan hidup di alam demokrasi masih merupakan teori untuk bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya baru pada saat sekarang inilah kita ada dalam proses menuju demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Karena demokrasi bukanlah kata benda, tetapi kata kerja sebagai proses menuju demokrasi, maka demokrasi bukanlah sesuatu yang akan terwujud bagaikan jatuh dan langit, melainkan menyatu dengan pengalaman nyata, usaha dan eksperimentasi kita sehari-hari. Di sinilah persis tempatnya demokrasi memerlukan ideologi yang terbuka, yang menolak suatu rumusan ideologis yang sekali untuk selamanya (*once and for all*). Karena kalau begitu, ideologi tersebut akan mengalami suatu *obsolete*, ketinggalan zaman. Ini berarti, demokrasi harus terbuka terhadap kemungkinan coba dan salah, dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus-menerus melakukan koreksi dan perbaikan.

Titik kuat demokrasi, dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi diri sendiri. Inilah keterbukaan demokrasi, karena ia selalu ada dalam proses menuju demokrasi. Demokrasi bukanlah suatu keadaan sosial-politik yang sudah selesai, sekali untuk selamanya. [❖]